

Title : Ilusi Kebebasan Pers di Asia Tenggara

Author(s) : Awang Dharmawan

Institution : Universitas Negeri Surabaya

Category : Opinion, Competition

Topics : Communication

Ilusi Kebebasan Pers di Asia Tenggara

Oleh: Awang Dharmawan

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya)

Jenis tulisan: opini

Pers di Era Disrupsi Informasi

Christophe Deloire sebagai Sekretaris Jendral Reporters Without Borders (RSF) menyatakan, “journalism is the best vaccine against disinformation.” Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tema utama dalam rilis indeks kebebasan pers dunia oleh RSF pada April 2021. RSF yaitu organisasi nonpemerintah internasional yang intensif meneliti kebebasan pers, mencakup 180 negara di seluruh dunia.

Esensi tema tersebut menyoroti bahwa sebenarnya di tengah disrupsi informasi melalui penetrasi teknologi digital, juga berdampak pada luapan penyebaran hoaks dan disinformasi yang mudah sekali viral melalui media sosial. Ujungnya pengguna sosial media sangat mudah terjebak pada kondisi ketidakpastian dan cemas karena informasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, rilis indeks kebebasan pers tahun ini juga sebagai tanda yang menegaskan bahwa pers menjadi harapan sumber informasi terpercaya, sekaligus memverifikasi luapan informasi yang bias dan lemah kebenarannya di era disrupsi. Hal ini tidak lain karena kerja-kerja jurnalistik berpijak pada penggalian kebenaran fakta, dan kedalaman informasi secara berimbang, sehingga menjadi landasan pers dalam membuat berita.

Tapi, apakah pers sendiri tidak pernah terjerumus menciptakan bias informasi? Berdasarkan penelitian Lembaga Edelman Trust Barometer pada 2021, bahwa 59% responden di 28 negara mengatakan bahwa jurnalis dengan sengaja menyesatkan publik dan melaporkan informasi yang mereka tahu itu menjadi palsu. Realitas pers yang seperti ini lebih karena condong pada kepentingan ekonomi politik medianya, sehingga tidak mampu menjaga marwah fungsi pers. Begitupun bagi Cristophe Deloire menyesalkan, ketika pers dalam memproduksi dan mendistribusikan berita terhambat dan larut oleh faktor kepentingan ekonomi, politik, teknologi, dan bahkan budaya. Meskipun baginya, pers tetap menjadi jalur ampuh dalam meluruskan disinformasi dan hoaks yang viral di berbagai media personal di media digital. Hal ini karena semua kegiatan pers masih diatur melalui sistem dan kode etik jurnalistik, sehingga ada tanggung jawab dan sanksi yang berlaku untuk menjaga kualitas berita kepada publik.

Indeks Kebebasan Pers di Asia Tenggara

Tentu menjadi persoalan ketika negara-negara yang tidak mampu menjamin kebebasan persnya, maka semakin sulit menandingi gelombang disinformasi dan hoaks yang sangat mudah menyebar di media sosial. Ketika negeri para *buzzer* sudah begitu mengaburkan dan bahkan memutarbalikkan kebenaran tentang fakta, maka fungsi pers sebagai pilar demokrasi menjadi penetralisir atas berbagai kesesatan. Sedangkan masyarakat tidak seharusnya bertarung sendiri dan bisa larut terpapar dengan berbagai serangan informasi palsu yang sengaja diproduksi kepentingan pragmatis. Semakin terpuruk ketika masih terjadi kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap informasi digital, terlebih pada isu sensitif tentang pertentangan suku, agama, ras, dan golongan yang bisa menjadi komoditas konten hoaks dan disinformasi. Maka pers harus dibentuk dalam sistem demokrasi yang bebas dari dominasi kelompok bisnis dan politik tertentu, agar bisa menjadi saluran kontrol sosial yang berada pada kepentingan publik.

Apalagi indeks kebebasan pers di Asia Tenggara penting disoroti, karena hampir semua negara di Asia Tenggara termasuk pada peringkat di atas 100 dari 180 negara, kecuali hanya Timor Leste yang ada pada peringkat 71 dan termasuk zona kuning. Kemudian disusul Indonesia pada peringkat 113, Malaysia (119), Thailand (137), Filipina (138), Myanmar (140), Kamboja (144), Singapura (160), Brunei Darusalam (154), Laos (172), dan Vietnam (175).

Perlu ditekankan bahwa sistem pers dan sistem media sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan oleh negara tersebut. Pengaruh pemerintahan otoriter baik saat ini atau masa sebelumnya menjadi salah satu faktor yang berdampak pada impian sistem pers demokratis yang tertatih-tatih di seluruh negara di Asia Tenggara. Apalagi bagi Vietnam yang pernah mewarisi sebagai negara komunis, sangat sulit lepas dari kontrol kuat negara terhadap intervensi sistem dan organisasi persnya. Begitupun dengan pemerintahan yang masih kuat dengan budaya monarki seperti Thailand, Brunei, dan Malaysia. Berikutnya Myanmar yang pemerintahannya dikudeta oleh kekuatan junta militer yang otoriter. Sedangkan Indonesia lama berada pada masa pemerintahan otoriter orde baru, dan sekarang terus bertransisi membangun sistem pers yang lebih bebas. Fase transisi demokrasi yang dihadapi negara-negara Asean masih panjang, termasuk dalam membangun pers yang bebas dari kekerasan terhadap jurnalis, bebas dari tekanan pemerintah, dan termasuk bebas dari kepentingan dominasi korporasi tertentu.

Bagi Huong NGO pada 2011 dalam tesisnya yang berjudul *Why Cannot Freedom of Expression and Information Be Protected As A Constitutional Right In Asean?* menjelaskan bahwa salah satu poin untuk mewujudkan kebebasan ekspresi dan informasi di Asean adalah dengan membangkitkan nilai-nilai regional Asean dan ideologi moral. Nilai-nilai Asean ini merujuk pada perbedaan budaya, agama, etnis yang beragam, sehingga perlu menjunjung nilai-nilai harmoni, konsensus, dan kolektivitas. Kesamaan semangat sebagai bagian dari Asean yang demokratis perlu dibuat lebih manifes dan itu harus kolektif sesama negara-negara Asean. Bagi negara yang sudah lebih stabil bertransisi dengan sistem demokrasi, perlu memotori wujud sistem pers demokrasi, dengan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami jurnalis, semakin memperkuat pers dengan dibentuknya ombudsman, dan memperkuat sistem dan implementasi perlindungan bagi hak-hak jurnalis dalam bertugas jurnalistik. Saya selalu teringat dengan jargon yang disampaikan seorang sahabat bahwa *good journalism for good civilization*.